

NPM:59852041FH17**ABSTRAK**

Pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal pembagian Air antara petani sawah dengan petani ikan dan galian C di Kabupaten Lombok Timur masih belum optimal sehingga menimbulkan konflik ditingkat lapangan. penelitian ini bertujuan untuk:1).Menganalisis Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian.2). Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik dibidang irgasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian normative empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipakai dalam pengelolaan sumber daya air di kabupaten Lombok Timur masih menggunakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air karena belum adanya peraturan ditingkat perda ataupun perbup Lombok Timur yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal pembagian air antara petani sawah dan petani ikan kolam maupun pengelola galian C. pelaksanaan pelayanan publik terhadap pengelolaan sumber daya air dibidang irigasi pengairan pertanian belum maksimal sehingga sering menimbulkan konflik di lapangan. Seharusnya Peranan Pemerintah dalam pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kecamatan Lenek dan Suralaga lebih dioptimalkan terutama dalam hal pembagian air antara petani sawah dan petani kolam ikan serta pengelola galian C sehingga tidak menimbulkan konflik secara terus menerus.

Kata Kunci : Pengelolaan, irigasi, pengairan dan pertanian